

**PENGARUH INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL PEMERINTAH
DAERAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PROGRAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

TIARA AMALIA RAHMAYANI

NPM 2416041101



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Manfaat Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Landasan Teori.....	15
2.3 Kerangka Berfikir.....	18
2.4 Hipotesis Penelitian.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Paradigma Penelitian.....	22
3.2 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	23
3.3 Metode Operasionalisasi Konsep.....	25
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.5 Metode Pengujian Data.....	31
3.6 Metode Analisis Data.....	34
3.7 Keterbatasan Penelitian.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan besar dalam hubungan antara masyarakat dan lembaga publik. Saat ini, internet dan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, serta YouTube menjadi saluran utama dalam menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan tanggapan secara langsung dan real-time. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran penting dari pola komunikasi tradisional menuju komunikasi interaktif berbasis digital. Sejalan dengan perkembangan tersebut, laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2024 menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221,56 juta jiwa atau sekitar 79,5% dari populasi, dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 229,43 juta jiwa dengan penetrasi 80,66%. Data dari *We Are Social/Hootsuite* (2024) juga mencatat bahwa rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari tiga jam setiap hari untuk menggunakan media sosial. Fakta ini menegaskan bahwa media sosial tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi telah menjadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari.

Bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Lampung, media sosial kini memiliki peran strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (2002) yang menjelaskan bahwa komunikasi pembangunan menekankan pada penggunaan strategi komunikasi yang efektif guna menyebarkan informasi, mengubah perilaku, serta mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam upaya kemajuan sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah kini semakin aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana strategis untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Melalui akun resmi di berbagai platform, pemerintah dapat menyampaikan informasi terkait program pembangunan,

regulasi, layanan administrasi, hingga pengumuman penting secara cepat dan praktis. Kehadiran media sosial juga mendukung terwujudnya prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Dengan kata lain, media sosial telah menjadi bagian penting dari strategi komunikasi publik pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, Mannayong et al. (2024) menegaskan bahwa transformasi digital yang efektif melalui media sosial, forum daring, maupun aplikasi seluler tidak hanya memperluas jangkauan informasi pemerintah, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berkolaborasi dalam proses kebijakan.

Dalam konteks e-government, kualitas birokrasi dan kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelayanan publik. Katharina (2020) menegaskan bahwa reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat. Sayangnya, kualitas pelayanan publik di Indonesia masih sering dianggap kurang optimal, terutama di daerah, akibat birokrasi yang belum berjalan efektif. Oleh karena itu, transformasi digital melalui penerapan e-government sangat dibutuhkan untuk menciptakan pelayanan yang cepat, transparan, dan adil. Pemanfaatan media sosial di tingkat daerah tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi secara teknis, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir birokrasi agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Publik kini dapat dengan mudah menyampaikan kritik maupun tuntutan melalui kanal digital, sehingga respons pemerintah yang lambat berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Umayasari dan Amatha (2025) menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui pemanfaatan media sosial yang efektif, pemerintah tidak hanya dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan, tetapi juga membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi publik secara langsung. Keterlibatan masyarakat yang muncul dari interaksi digital tersebut mampu meningkatkan rasa memiliki terhadap program pemerintah serta memperkuat kepercayaan publik. Namun demikian, efektivitas komunikasi digital ini sangat dipengaruhi oleh

konsistensi, kejelasan pesan, dan kesigapan pemerintah daerah dalam merespons umpan balik dari masyarakat. Dengan demikian, media sosial tidak cukup hanya dijadikan sarana publikasi, tetapi harus diintegrasikan dengan sistem pelayanan publik yang partisipatif agar mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara nyata. Transformasi digital di daerah menuntut adanya komitmen dari para pemimpin untuk mendorong keterbukaan informasi. Pemimpin yang adaptif terhadap perkembangan teknologi akan lebih mudah membangun komunikasi dengan masyarakat melalui gaya kepemimpinan yang inklusif.

Dalam konteks pembangunan, kepemimpinan digital berperan penting untuk mempercepat penyampaian informasi, memperluas jangkauan sosialisasi program, serta membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dengan cara ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi publik, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Namun, tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengoptimalkan media sosial. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan budaya birokrasi menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi e-government di tingkat lokal. Ada daerah yang berhasil menggunakan media sosial untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, sementara daerah lain hanya menjadikannya sebagai saluran pengumuman tanpa interaksi berarti. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas media sosial sebagai instrumen e-government sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu menjadikannya sebagai ruang komunikasi timbal balik yang sehat dengan warganya. Partisipasi masyarakat merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Partisipasi tidak hanya berarti kehadiran warga dalam forum, tetapi mencakup keterlibatan aktif mereka dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi melalui media sosial diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat untuk lebih terlibat. Namun, kenyataannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

masih belum optimal. Banyak warga hanya berperan sebagai konsumen informasi tanpa benar-benar terlibat dalam diskusi publik, konsultasi kebijakan, atau pelaksanaan program. Tantangan utama yang sering muncul antara lain rendahnya literasi digital, kurangnya kesadaran mengenai pentingnya partisipasi, serta minimnya mekanisme umpan balik yang efektif dari pemerintah.

Penelitian Fajrilla (2025) menegaskan bahwa meskipun media sosial cukup efektif dalam menyebarkan informasi, tingkat keterlibatan masyarakat tetap sangat dipengaruhi oleh motivasi dan kepedulian mereka terhadap isu publik. Dengan demikian, kualitas partisipasi masyarakat harus dilihat bukan hanya dari kuantitas kehadiran, tetapi dari sejauh mana mereka aktif menyampaikan ide, memberikan masukan, dan berkontribusi dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat yang ideal bukan hanya diukur dari jumlah kehadiran dalam forum, tetapi dari sejauh mana warga aktif menyampaikan ide, memberi masukan, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sering kali masih bersifat dangkal. Banyak warga hanya mengikuti informasi tanpa benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam bentuk ide maupun tindakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi partisipasi yang ditawarkan media sosial dengan realitas keterlibatan publik yang rendah. Situasi ini semakin rumit karena tidak semua kelompok masyarakat memiliki literasi digital yang memadai, sehingga sebagian tertinggal dalam proses transformasi digital. Selain itu, faktor kepercayaan publik terhadap pemerintah juga berpengaruh besar. Ketika masyarakat merasa pendapat mereka tidak direspons atau ditindaklanjuti, mereka cenderung pasif dan enggan terlibat kembali. Sebaliknya, jika pemerintah cepat memberikan respon yang jelas dan transparan, partisipasi masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Oleh sebab itu, media sosial tidak seharusnya hanya digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, melainkan harus difungsikan sebagai ruang dialog yang memberi makna nyata bahwa suara masyarakat dihargai dalam proses pembangunan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara penggunaan media sosial pemerintah daerah dengan keterlibatan nyata masyarakat. Kesenjangan ini menjadi alasan pentingnya penelitian untuk mengetahui sejauh mana informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah benar-benar mampu mendorong partisipasi warga. Pemerintah daerah perlu memahami efektivitas strategi komunikasi digital agar tidak berhenti pada penyebaran informasi, tetapi juga dapat mendorong tindakan nyata masyarakat.

Umayasari dan Amantha (2025) menegaskan bahwa partisipasi publik akan meningkat apabila masyarakat merasa pendapatnya dihargai dan pemerintah cepat memberikan respon atas masukan yang disampaikan melalui platform digital. Lebih jauh, kesenjangan antara ketersediaan informasi dan keterlibatan nyata masyarakat dalam pembangunan sering kali disebabkan oleh beberapa faktor mendasar. Pertama, pola komunikasi pemerintah daerah di media sosial masih cenderung bersifat satu arah (top-down), sehingga masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima informasi, bukan mitra aktif. Kedua, mekanisme umpan balik yang ada sering kali tidak ditindaklanjuti secara transparan, sehingga menimbulkan persepsi bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh nyata pada pengambilan keputusan. Ketiga, adanya perbedaan sosial-ekonomi dan literasi digital juga turut memengaruhi tingkat keterlibatan, di mana kelompok dengan keterbatasan akses teknologi lebih sering menjadi penonton pasif, sementara kelompok yang lebih melek digital cenderung lebih aktif dalam memberikan masukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media sosial belum sepenuhnya berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Jika pola komunikasi satu arah terus dibiarkan, media sosial berisiko hanya menjadi etalase pencitraan pemerintah tanpa menyediakan ruang dialog yang bermakna.

Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi semu dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi keberhasilan program. Dalam jangka panjang, hal ini bahkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap

pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi digital yang lebih inklusif dan interaktif. Masyarakat tidak hanya diajak untuk mengetahui program pembangunan, tetapi juga dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, media sosial dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal. Kehadiran media sosial seharusnya tidak lagi dipahami sekadar sebagai alat publikasi, melainkan sebagai ruang bersama yang menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah yang mampu mengoptimalkan peran media sosial akan lebih mudah membangun komunikasi transparan, meningkatkan partisipasi publik, serta memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan di mata warga. Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan antara media sosial pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat memiliki urgensi baik secara akademis maupun praktis. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan erat antara motivasi, kinerja, dan akuntabilitas dalam mendorong partisipasi publik. Hal ini sejalan dengan temuan Yuana dkk. (2025) yang menegaskan bahwa good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi dan kinerja pegawai, di mana transparansi dan akuntabilitas mampu memperkuat komitmen serta meningkatkan efektivitas kerja aparatur publik. Dalam konteks ini, informasi yang disampaikan melalui media sosial dapat berfungsi sebagai faktor pendorong (motivasi) bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat kemudian menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam melibatkan publik, sedangkan akuntabilitas pemerintah menjadi penentu apakah partisipasi tersebut benar-benar bermakna.

Motivasi masyarakat untuk berpartisipasi tidak muncul secara otomatis, tetapi dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, motivasi cenderung tumbuh ketika pembangunan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Dari sisi eksternal, motivasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan iklim komunikasi yang terbuka dan inklusif. Apabila masyarakat merasa bahwa suara mereka dihargai, maka mereka akan lebih terdorong untuk

ikut serta secara aktif. Kinerja pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat. Informasi pembangunan yang disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan transparan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi juga memastikan masyarakat mengetahui bagaimana proses pembangunan dijalankan, siapa yang terlibat, serta apa dampaknya. Pemahaman yang baik mengenai alur pembangunan akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong keterlibatan yang lebih besar. Selain kinerja, akuntabilitas pemerintah juga menjadi faktor krusial. Akuntabilitas yang tinggi membuat masyarakat yakin bahwa keterlibatan mereka bukan formalitas semata, melainkan benar-benar berpengaruh terhadap kebijakan. Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas akan menurunkan partisipasi karena masyarakat merasa masukan mereka tidak membawa perubahan nyata. Dengan demikian, motivasi, kinerja, dan akuntabilitas merupakan tiga komponen yang saling terkait dalam membangun partisipasi masyarakat. Media sosial dapat menjadi katalis yang memperkuat hubungan ketiganya, asalkan pemerintah daerah mampu menggunakannya secara efektif sebagai sarana interaksi dan pengawasan publik.

Fenomena rendahnya partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Misalnya, masyarakat adat di Papua, seperti di Kabupaten Tolikara, memiliki karakteristik sosial yang homogen dan tingkat ketergantungan tinggi pada pemerintah. Hal ini membuat partisipasi mereka dalam pembangunan cenderung pasif dan terbatas. Hambatan lain yang muncul adalah ketidakseimbangan informasi, budaya patron-klien, serta rendahnya kapasitas pendidikan (Sitorus et al., 2023). Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa karakteristik sosial budaya berperan penting dalam menentukan tingkat keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, terdapat contoh praktik baik pemanfaatan media sosial oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Surabaya secara aktif menggunakan Instagram dan Twitter untuk menyebarkan informasi mengenai program kebersihan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa

Barat melalui akun resmi “@jabarprovgoid” juga konsisten membagikan informasi pembangunan sekaligus membuka ruang diskusi publik.

Meskipun demikian, tingkat keterlibatan masyarakat masih bervariasi. Sebagian warga merespons dengan antusias, sementara yang lain hanya menjadi penonton pasif. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konteks sosial dan budaya di setiap daerah sangat memengaruhi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi pemerintah daerah melalui media sosial harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat agar pesan pembangunan lebih mudah diterima dan direspons. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai komunikasi politik, tata kelola pemerintahan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi teoritis untuk mengisi celah literatur yang masih terbatas terkait efektivitas media sosial pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi publik.

Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi nyata bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan media sosial secara lebih efektif. Dengan strategi komunikasi yang tepat, media sosial dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran, keterlibatan, dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance, di mana transparansi dan partisipasi publik menjadi aspek utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi aplikatif untuk meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini relevan baik secara teoritis untuk pengembangan ilmu administrasi publik maupun secara praktis bagi peningkatan strategi komunikasi pemerintah daerah di era digital. Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, jelas bahwa media sosial memiliki potensi besar sekaligus tantangan dalam mendorong partisipasi masyarakat. Di satu sisi, media sosial mampu memperluas akses informasi, membuka ruang diskusi, dan memperkuat transparansi. Namun di sisi lain, tanpa strategi komunikasi yang tepat, media sosial berisiko hanya menjadi saluran formalitas

yang tidak meningkatkan keterlibatan nyata. Inilah yang menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan, guna memahami sejauh mana informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah benar-benar mampu memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial memiliki potensi besar sebagai sarana komunikasi publik pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara banyaknya informasi yang disebarkan dengan rendahnya keterlibatan nyata masyarakat. Penelitian terdahulu tentang motivasi, kinerja, dan akuntabilitas juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh sejauh mana informasi tersebut mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang aktif memanfaatkan media sosial dalam penyebaran informasi publik dan pembangunan, melalui akun resmi seperti “@lampungprov” di Instagram dan Facebook. Namun, sejauh mana informasi tersebut benar-benar mendorong partisipasi masyarakat dalam program pembangunan masih perlu dikaji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh informasi melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Provinsi Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu administrasi publik, sekaligus manfaat praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi komunikasi digital yang lebih efektif, dialogis, dan berkelanjutan. Dengan optimalisasi media sosial, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan inklusif, sehingga sejalan dengan prinsip good governance.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam

- program pembangunan di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas informasi pemerintah daerah di media sosial memengaruhi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif?
 3. Faktor-faktor apa yang memperkuat atau menghambat efektivitas media sosial pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi publik?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Provinsi Lampung.
2. Menjelaskan bagaimana transparansi dan akuntabilitas informasi pemerintah daerah di media sosial memengaruhi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat atau menghambat efektivitas media sosial pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi publik.

1.4.Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya mengenai komunikasi pemerintahan digital, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Memperkaya literatur mengenai pengaruh media sosial pemerintah daerah terhadap keterlibatan publik dalam program pembangunan.

b) Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi strategi komunikasi digital yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan daerah

c) Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya

Menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang menyoroti hubungan media sosial, partisipasi masyarakat, dan prinsip *good governance* dalam konteks pembangunan daerah. Mendorong penelitian perbandingan antar daerah atau antar platform media sosial untuk mengetahui perbedaan efektivitas dalam meningkatkan partisipasi publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu penting untuk mengetahui posisi penelitian ini di antara studi yang sudah ada serta untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (research gap) yang akan diisi. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pengaruh informasi melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitiab	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian ini
Andre Noevi Rahmanto (2022)	Pengaruh penggunaan media sosial pemerintah daerah di Solo Raya terhadap persepsi publik tentang good governance, yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.	Ditemukan bahwa media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi publik mengenai good governance dan ketiga aspeknya (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi), meskipun pengaruhnya masih tergolong rendah, yaitu	Relevan karena sama-sama menganalisis pengaruh media sosial terhadap partisipasi masyarakat, namun penelitian ini akan memperluas fokus pada konteks pembangunan daerah di Provinsi

		sebesar 4,2%.	Lampung
Fahrul Vicky Anggiawan (2023)	Optimalisasi publikasi informasi pemerintah melalui media Sosial di Kabupaten Sukoharjo.	Menemukan bahwa masyarakat di Kabupaten Sukoharjo peka terhadap informasi di media sosial pemerintah dan sebagian besar mendapatkan pengaruh positif. Namun, masih ada isu politik yang tersirat, dan ada masyarakat yang memberikan komentar negatif terkait unggahan.	Penelitian ini menunjukkan pentingnya kualitas informasi dan interaksi di media sosial terhadap partisipasi publik, yang menjadi dasar untuk meneliti pengaruh informasi pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat di Lampung.
Julpahmi (2023)	Pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik generasi milenial Himpunan Mahasiswa	Penggunaan media sosial berpengaruh sebesar 29% terhadap partisipasi politik generasi milenial HAMAS pada	Walaupun konteksnya berbeda (politik), hasil ini memperkuat asumsi bahwa media sosial dapat memengaruhi

	Aceh Selatan (HAMAS) pada Pemilu Presiden 2019.	Pemilu 2019. Meskipun partisipasi politik secara umum rendah (11,43%), mayoritas responden (90,48%) tetap memberikan suara.	perilaku partisipatif masyarakat.
Ulfa Umayasari & Goestyari Kurnia Amantha (2025)	Partisipasi warga melalui media digital dan implikasinya terhadap akuntabilitas serta perumusan kebijakan pemerintah daerah di Lampung.	Partisipasi digital di Lampung sudah berkembang, tetapi masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan digital (digital divide), literasi yang belum merata, dan resistensi birokrasi. Partisipasi digital warga mampu meningkatkan	Relevan karena membahas konteks wilayah yang sama, yaitu Lampung. Penelitian ini akan memperkuat bukti empiris dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh informasi melalui media

		akuntabilitas dan mempengaruhi kebijakan, seperti kasus viral perbaikan jalan.	sosial terhadap partisipasi masyarakat.
--	--	--	---

Dari berbagai penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar studi sebelumnya menyoroti hubungan antara media sosial dan partisipasi masyarakat, namun sebagian besar dilakukan dalam konteks politik atau pelayanan publik secara umum. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengukur secara kuantitatif pengaruh informasi melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan daerah, terutama di Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif, sementara penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel informasi media sosial (X) terhadap partisipasi masyarakat (Y). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru mengenai efektivitas komunikasi digital pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi publik.

2.2.Landasan Teori

Landasan teori menjadi dasar konseptual bagi peneliti untuk menjelaskan hubungan antarvariabel yang dikaji. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan disusun berdasarkan tiga tingkatan, yaitu grand theory, middle theory, dan applied theory. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara informasi melalui media sosial pemerintah daerah (X) dengan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan (Y), sehingga teori yang digunakan berakar dari konsep Administrasi Pembangunan.

2.2.1. Teori Administrasi Pembangunan

Teori Administrasi Pembangunan merupakan kerangka besar yang menjelaskan bagaimana kegiatan pemerintahan diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Menurut Siagian (2020) dalam buku Administrasi Pembangunan yang ditulis oleh Ali dkk (2024) , administrasi pembangunan adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya, mengatur kebijakan, dan mengoordinasikan berbagai aktivitas pembangunan agar mampu menciptakan perubahan sosial menuju kesejahteraan masyarakat. Teori ini memandang bahwa pembangunan bukan hanya kegiatan ekonomi, melainkan proses sosial dan politik yang menuntut partisipasi masyarakat serta kemampuan pemerintah dalam mengatur sistem administrasi yang responsif. Administrasi pembangunan berfungsi sebagai alat (instrumental function) dan sekaligus proses (process function) untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar berpikir bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada bagaimana pemerintah menjalankan sistem administrasi yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat di dalamnya.

2.2.2. Teori Sistem dalam Administrasi Pembangunan

Teori Sistem merupakan bagian penting dalam konsep administrasi pembangunan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses pembangunan bekerja secara terpadu melalui berbagai unsur yang saling berhubungan. Menurut Sudirman, sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling bergantung, berinteraksi, dan berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks administrasi pembangunan, Teori Sistem memandang bahwa pembangunan terdiri atas empat komponen utama:

1. Input, yaitu sumber daya, kebijakan, informasi, dan dukungan masyarakat yang menjadi bahan dasar pelaksanaan pembangunan.
2. Proses, yaitu tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

3. Output, yaitu hasil dari kegiatan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat, seperti kesejahteraan, pelayanan publik, dan meningkatnya partisipasi sosial.
4. Feedback, yaitu tanggapan atau umpan balik dari masyarakat terhadap hasil pembangunan yang telah dijalankan, yang kemudian digunakan untuk memperbaiki sistem selanjutnya.

Buku Administrasi Pembangunan menjelaskan bahwa keberhasilan sistem pembangunan sangat ditentukan oleh efektivitas interaksi antara keempat komponen tersebut. Setiap komponen tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus terhubung secara sinergis agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Dengan menggunakan Teori Sistem sebagai middle theory, penelitian ini menekankan bahwa proses pembangunan akan berjalan optimal apabila terdapat aliran informasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari sistem yang saling memengaruhi.

2.2.3. Penerapan Teori Sistem dalam Penelitian

Teori Sistem diterapkan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara informasi melalui media sosial pemerintah daerah (X) dengan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan (Y). Dalam kerangka sistem pembangunan:

1. Informasi melalui media sosial berperan sebagai input, yaitu sumber informasi dan komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai program pembangunan.
2. Proses terjadi ketika masyarakat menerima, memahami, dan merespons informasi tersebut melalui aktivitas diskusi, dukungan, atau kritik terhadap kebijakan pemerintah.
3. Output dari sistem ini tercermin pada tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam bentuk keikutsertaan dalam kegiatan pembangunan maupun dalam pengawasan dan evaluasi program.
4. Feedback berupa tanggapan masyarakat di media sosial menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menilai keberhasilan

komunikasi dan melakukan perbaikan kebijakan.

Dengan demikian, penggunaan media sosial oleh pemerintah daerah dapat dipandang sebagai mekanisme sistem yang menghubungkan input dan output dalam proses administrasi pembangunan. Informasi yang disampaikan melalui media sosial menjadi faktor penting yang memengaruhi sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

2.2.4. Sintesis Teoretis

Berdasarkan uraian di atas, Teori Administrasi Pembangunan berfungsi sebagai dasar besar (*grand theory*) yang menempatkan pembangunan sebagai kegiatan administratif yang berorientasi pada perubahan sosial. Di dalamnya, Teori Sistem berperan sebagai *middle theory* yang menjelaskan bagaimana pembangunan dijalankan melalui hubungan antarunsur yang saling memengaruhi. Penerapan teori sistem dalam konteks media sosial menunjukkan bahwa komunikasi publik merupakan bagian dari mekanisme sistem pembangunan yang menghasilkan umpan balik berupa partisipasi masyarakat. Dengan demikian, teori sistem menjadi landasan kuat untuk menganalisis pengaruh informasi melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Provinsi Lampung.

2.3. Kerangka Berfikir

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pemerintah daerah berinteraksi dengan masyarakat. Media sosial menjadi sarana strategis bagi pemerintah dalam menyebarkan informasi, membangun komunikasi dua arah, dan meningkatkan keterlibatan publik dalam pembangunan daerah. Melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, pemerintah daerah dapat menyampaikan program, kebijakan, serta capaian pembangunan secara cepat dan interaktif. Menurut Teori Administrasi Pembangunan (Ndraha, 1991), keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan

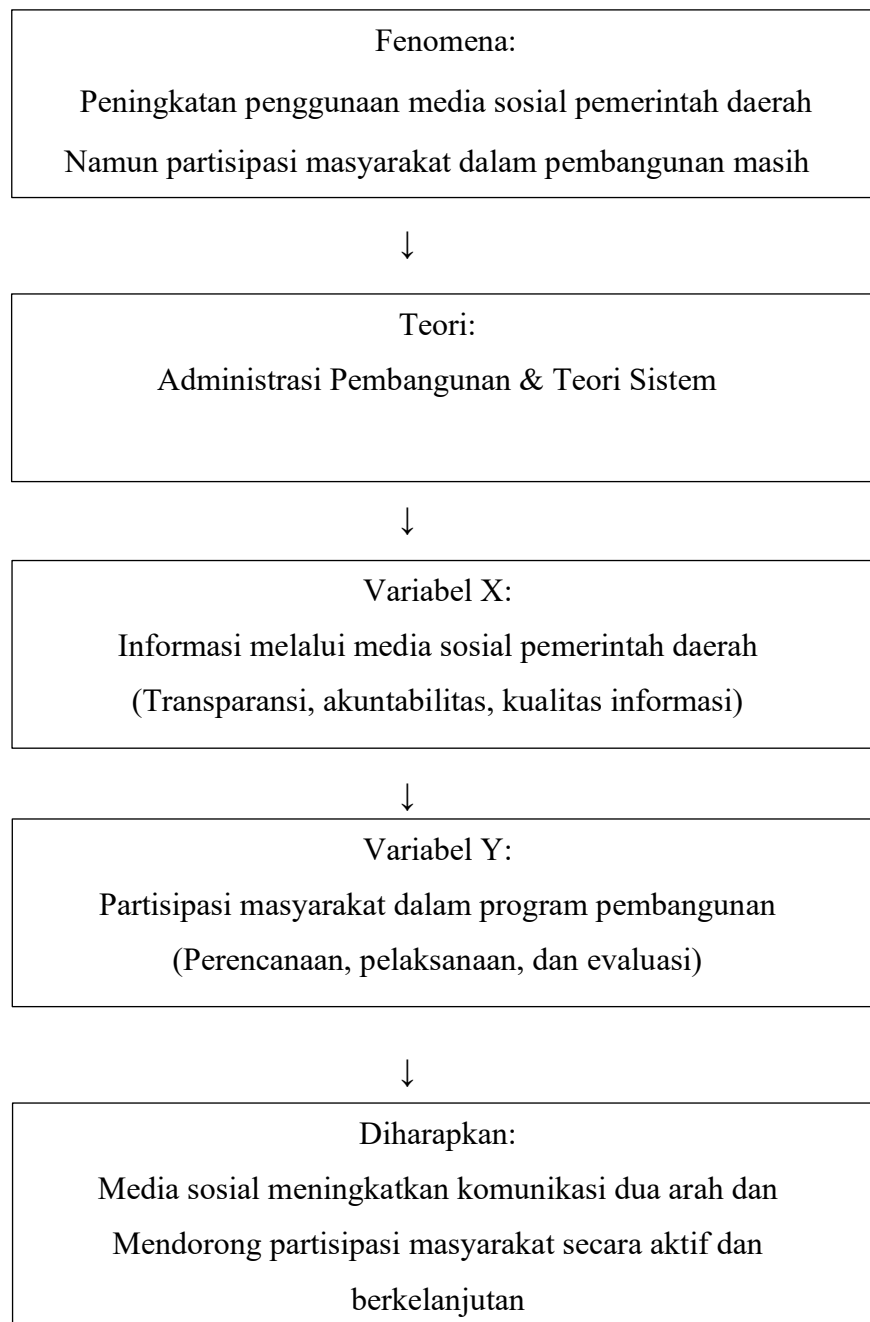
pemerintah, tetapi juga pada kemampuan sistem administrasi untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pembangunan. Dalam konteks ini, Teori Sistem (Siagian, 1994) digunakan untuk menjelaskan bahwa proses pembangunan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari input, proses, output, dan umpan balik.

Informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah berperan sebagai input dalam sistem pembangunan. Informasi ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk memahami arah dan tujuan program pembangunan. Selanjutnya, proses terjadi ketika masyarakat menerima dan mengolah informasi tersebut, misalnya dengan berdiskusi, memberikan tanggapan, atau menyampaikan aspirasi di ruang digital. Output dari proses tersebut adalah meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, baik dalam bentuk ide, keikutsertaan kegiatan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaannya. Terakhir, feedback berupa respon masyarakat di media sosial menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan dan strategi komunikasi publik. Beberapa penelitian terdahulu mendukung hubungan antara informasi digital dan partisipasi masyarakat. Penelitian Rahmanto (2022) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan partisipasi publik. Anggiawan (2023) menegaskan bahwa kualitas informasi dan interaksi digital mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan Umayasari dan Amantha (2025) menemukan bahwa partisipasi digital di Lampung dapat meningkatkan akuntabilitas, meskipun masih terkendala kesenjangan literasi dan resistensi birokrasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas media sosial pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap motivasi dan keterlibatan publik dalam pembangunan.

Dengan demikian, secara konseptual, semakin baik kualitas informasi melalui media sosial pemerintah daerah (X) yang ditandai dengan transparansi, kejelasan, dan kecepatan respon maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi

masyarakat dalam program pembangunan (Y). Hubungan ini mencerminkan bahwa media sosial bukan sekadar alat komunikasi satu arah, tetapi menjadi instrumen partisipatif dalam administrasi pembangunan yang responsif dan inklusif.

Secara sederhana, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



2.4.Hipotesis Penelitian

H_a: Terdapat pengaruh signifikan antara informasi melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Provinsi Lampung.

H_o: Tidak terdapat pengaruh signifikan antara informasi melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Provinsi Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan seperangkat keyakinan dasar yang menjadi landasan dalam memandang realitas sosial dan menentukan cara peneliti memahami, menjelaskan, serta memecahkan suatu permasalahan. Dalam penelitian ini digunakan paradigma positivistik, yang berpandangan bahwa realitas sosial bersifat objektif, dapat diamati, diukur, dan dijelaskan melalui hubungan sebab- akibat antar variabel yang dapat diuji secara empiris.Paradigma positivistik berakar pada pemikiran Auguste Comte dan John Stuart Mill, berpandangan bahwa realitas sosial bersifat objektif dan dapat diukur secara kuantitatif. Menurut Moleong (2018), paradigma ini meyakini bahwa fenomena sosial dapat dipahami melalui pengujian hipotesis secara sistematis untuk menemukan hukum umum, sama seperti penelitian dalam ilmu alam. Peneliti yang berpegang pada paradigma ini meyakini bahwa fenomena sosial dapat dipahami melalui pengukuran kuantitatif dan pengujian hipotesis secara sistematis. Tujuan utama dari paradigma ini adalah menemukan hukum umum (general law) yang berlaku secara luas, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih besar.Dalam konteks penelitian ini, paradigma positivistik digunakan untuk menjelaskan pengaruh informasi melalui media sosial pemerintah daerah terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Paradigma ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri sejauh mana informasi digital yang disampaikan pemerintah dapat memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

Selain itu, paradigma ini juga menuntut peneliti untuk bersikap objektif, netral, dan tidak memengaruhi hasil penelitian. Peneliti berperan sebagai pengamat yang mengumpulkan data sesuai prosedur ilmiah, kemudian menganalisisnya menggunakan metode statistik untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan terukur. Dengan demikian, paradigma positivistik

menjadi dasar yang kuat bagi penelitian ini untuk menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara singkat, paradigma positivistik dalam penelitian ini berfungsi untuk:

1. Menjelaskan fenomena sosial melalui pengukuran variabel yang dapat diamati.
2. Menguji hubungan sebab-akibat antara variabel bebas dan variabel terikat.
3. Menghasilkan kesimpulan yang bersifat objektif, rasional, dan dapat digeneralisasikan.

3.2. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel penelitian secara sistematis melalui data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Pendekatan ini berupaya menggambarkan fenomena sosial berdasarkan hasil perhitungan statistik sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif. Menurut Sugiyono (2013), pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis data bersifat statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sujarweni (2019), tujuan dari metode ini adalah untuk mengukur hubungan antar variabel dengan alat bantu statistik, sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk mengukur pengaruh informasi di media sosial terhadap partisipasi masyarakat secara terukur dan sistematis. Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pada pengukuran variabel dan pengujian teori yang relevan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan.

Metode yang digunakan adalah metode survei, yakni pengumpulan data primer dari responden menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama.

Metode survei dipilih karena dinilai efisien dalam menjangkau populasi yang luas dan memungkinkan peneliti memperoleh data yang representatif dalam waktu relatif singkat. Melalui survei, peneliti dapat mengidentifikasi persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap informasi pembangunan yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah.

Penerapan metode survei dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan, yaitu:

1. Penyusunan instrumen penelitian, berupa kuesioner yang memuat butir-butir pertanyaan sesuai indikator variabel penelitian.
2. Penentuan populasi dan sampel, untuk memastikan bahwa responden yang dipilih benar-benar mewakili karakteristik masyarakat Provinsi Lampung.
3. Pengumpulan data lapangan, melalui penyebaran kuesioner baik secara daring maupun luring kepada responden.
4. Pengolahan dan analisis data, yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu statistik untuk mengetahui arah dan kekuatan pengaruh antarvariabel.

Pendekatan kuantitatif dengan metode survei dinilai paling sesuai untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, yaitu untuk mengukur sejauh mana informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Melalui analisis statistik, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan hubungan yang nyata dan signifikan antara kedua variabel tersebut, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih efektif. Dengan demikian, pendekatan dan metode penelitian ini memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga menguji pengaruh dan hubungan kausal antarvariabel yang telah ditetapkan secara objektif dan sistematis.

3.3. Metode Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan langkah untuk menurunkan konsep teoretis yang bersifat abstrak menjadi variabel yang konkret dan dapat diukur melalui indikator tertentu. Tujuannya adalah agar setiap konsep dalam penelitian dapat diuji secara empiris berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu:

1. Variabel bebas (independen): Informasi melalui media sosial pemerintah daerah (X)
2. Variabel terikat (dependen): Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan (Y)

Kedua variabel tersebut dioperasionalkan berdasarkan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II. Dengan demikian, masing-masing variabel memiliki dimensi dan indikator yang dapat dijadikan dasar penyusunan instrumen penelitian berupa kuesioner.

3.3.1. Variabel Bebas (X): Informasi Melalui Media Sosial Pemerintah Daerah

Variabel ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Variabel ini berangkat dari teori komunikasi publik dan konsep manajemen pelayanan publik yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi, transparansi, serta kemudahan akses bagi warga.

Adapun dimensi dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator

Dimensi	Indikator	Pernyataan/Butir Pengukuran (contoh)	Skala
Keterbukaan Informasi	1. Pemerintah daerah	Informasi di media sosial	Likert (1–5)

	menyediakan informasi publik secara terbuka melalui media sosial.	pemerintah mudah diakses oleh masyarakat.	
	2.Informasi yang disampaikan bersifat transparan dan relevan dengan kebutuhan publik	Informasi yang diberikan pemerintah jelas dan tidak menyesatkan.	Likert (1–5)
Aksesibilitas dan Kemudahan	3.Akses terhadap akun media sosial pemerintah daerah mudah dilakukan.	Saya dapat dengan mudah menemukan akun resmi pemerintah daerah.	Likert (1–5)
	4.Frekuensi pembaruan informasi yang dilakukan pemerintah.	Pemerintah daerah rutin memperbarui informasi di media sosial.	Likert (1–5)
Interaktivitas	5.Pemerintah menanggapi komentar atau pertanyaan masyarakat secara aktif.	Pemerintah responsif terhadap masukan masyarakat di media sosial.	Likert (1–5)
	6.Terdapat ruang diskusi antara masyarakat dan pemerintah.	Media sosial pemerintah menjadi tempat berdiskusi mengenai pembangunan.	Likert (1–5)
Kredibilitas Informasi	7.Sumber informasi berasal	Saya yakin bahwa informasi yang	Likert (1–5)

	dari akun resmi Pemerintah.	dibagikan di media sosial pemerintah dapat dipercaya.	
	8. Kejelasan data atau konten yang dipublikasikan.	Informasi pembangunan yang dibagikan memuat data dan bukti yang jelas.	Likert (1–5)

3.3.2. Variabel Terikat (Y): Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan

Variabel ini mengukur sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan daerah, baik melalui partisipasi ide, tenaga, maupun evaluasi terhadap kebijakan publik. Konsep ini didasarkan pada teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang meliputi dimensi keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Tabel berikut menunjukkan operasionalisasi dari variabel Y:

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Y

Dimensi	Indikator	Pernyataan/ Butir Pengukuran (contoh)	Skala
Partisipasi dalam Perencanaan	1. Masyarakat mengetahui program pembangunan dari media sosial pemerintah.	Saya mengetahui program pembangunan daerah dari media sosial pemerintah.	Likert (1–5)
	2. Masyarakat memberikan ide atau saran terhadap rencana pembangunan.	Saya pernah memberikan pendapat atau masukan tentang pembangunan melalui media	Likert (1–5)

		sosial.	
Partisipasi Dalam Pelaksanaan	3.Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan	Saya pernah berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang diinformasikan lewat media sosial.	Likert (1–5)
	4.Informasi di media sosial memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintah.	Saya terdorong untuk berpartisipasi setelah melihat informasi pembangunan di media sosial pemerintah.	Likert (1–5)
Partisipasi dalam Evaluasi	5.Masyarakat memberikan tanggapan atau evaluasi terhadap hasil pembangunan.	Saya pernah memberikan penilaian terhadap hasil pembangunan daerah melalui media sosial.	
Partisipasi dalam Pengawasan	Masyarakat menggunakan media sosial untuk mengawasi kinerja Pemerintah	Saya menggunakan media sosial untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah daerah.	Likert (1–5)

3.3.3.Skala Pengukuran

Untuk mengukur kedua variabel penelitian di atas, digunakan skala Likert

Dengan lima kategori jawaban, yaitu:

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Netral

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

Skala Likert digunakan karena mampu mengukur sikap, persepsi, dan opini responden secara kuantitatif terhadap setiap indikator penelitian. Data yang diperoleh dari skala ini kemudian diubah menjadi skor numerik dan diolah menggunakan teknik analisis statistik guna menguji hipotesis penelitian..

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena berfungsi untuk memperoleh informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data yang dikumpulkan harus mampu menggambarkan kondisi objektif di lapangan agar hasil analisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, sehingga data yang diperoleh bersifat numerik dan dapat diolah secara statistik. Untuk mendukung keakuratan hasil penelitian, digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Data ini mencerminkan persepsi, pendapat, serta pengalaman masyarakat mengenai penggunaan media sosial pemerintah daerah dan tingkat partisipasi mereka dalam program pembangunan. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung dengan menyebarkan kuesioner tertutup menggunakan skala Likert kepada responden yang telah dipilih berdasarkan teknik sampling yang sesuai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, baik dari dokumen pemerintah, laporan penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta situs media sosial resmi pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih komprehensif terhadap temuan dari data primer.

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan dalam operasionalisasi konsep pada subbab sebelumnya.

Setiap item pertanyaan menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5). Kuesioner ini dibagi menjadi tiga bagian utama:

- a. Bagian I: Data identitas responden (umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan frekuensi penggunaan media sosial).
- b. Bagian II: Pernyataan mengenai variabel bebas, yaitu informasi melalui media sosial pemerintah daerah.
- c. Bagian III: Pernyataan mengenai variabel terikat, yaitu partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Penyebaran kuesioner dilakukan secara daring (online) menggunakan formulir digital seperti Google Form untuk menjangkau responden yang tersebar di berbagai wilayah Provinsi Lampung.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen, laporan kegiatan pemerintah daerah, unggahan media sosial resmi pemerintah, serta publikasi dari instansi terkait. Melalui teknik

ini, peneliti dapat membandingkan antara data lapangan dan dokumen resmi guna memperkuat validitas hasil penelitian.

3. Observasi Tidak Langsung

Selain kuesioner dan dokumentasi, peneliti juga melakukan pengamatan tidak langsung terhadap aktivitas media sosial pemerintah daerah. Pengamatan ini dilakukan untuk menilai seberapa aktif pemerintah dalam menyebarkan informasi dan menanggapi komentar masyarakat. Observasi ini bersifat melengkapi, bukan utama, sehingga hasilnya hanya digunakan sebagai bahan pendukung analisis kuantitatif.

3.4.3. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner, yang disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel penelitian. Instrumen ini dirancang untuk mengukur secara objektif sejauh mana:

1. Pemerintah daerah memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi publik (variabel X), dan
2. Masyarakat berpartisipasi dalam program pembangunan melalui pemanfaatan media sosial (variabel Y).

Penyusunan kuesioner dilakukan dengan memperhatikan tiga prinsip utama:

1. Relevansi, setiap butir pertanyaan disesuaikan dengan indikator variabel yang diteliti.
2. Kejelasan, kalimat disusun secara singkat dan mudah dipahami agar responden tidak mengalami kesalahan interpretasi.
3. Keterukuran, setiap item diberi skala penilaian kuantitatif agar dapat diolah secara statistik.

3.5. Metode Pengujian Data

Metode pengujian data digunakan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan, yaitu kuesioner, benar-benar layak, akurat, dan dapat dipercaya dalam mengukur variabel yang diteliti. Pengujian ini penting

agar data yang diperoleh dari responden valid dan reliabel sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Dalam penelitian kuantitatif, terdapat tiga tahap utama dalam pengujian data, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik (apabila menggunakan analisis regresi linear). Ketiga tahapan ini dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).

3.5.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Menurut Sugiyono (2013), instrumen dikatakan valid apabila setiap butir pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson Product Moment antara skor setiap butir pertanyaan dengan total skor variabel. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi antara skor item dengan skor total
 x = skor masing-masing item

Y = skor total item

N = jumlah responden

- Keterangan:
- (r_{xy}) = koefisien korelasi antara skor item dengan skor total
 - (x) = skor masing-masing item
 - (y) = skor total item
 - (n) = jumlah responden
- Kriteria pengambilan keputusan:
- Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (dengan taraf signifikansi 0,05), maka item dinyatakan valid.
 - Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka item tersebut tidak valid dan perlu direvisi atau dihapus.

Uji validitas dilakukan untuk seluruh item pernyataan dalam kuesioner yang mencakup variabel informasi melalui media sosial pemerintah daerah (X) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Y). Hasil uji validitas akan menentukan butir-butir mana saja yang layak digunakan untuk tahap analisis data selanjutnya.

3.5.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian dapat memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran berulang terhadap objek yang sama. Menurut Ghazali (2018), reliabilitas menunjukkan tingkat kestabilan dan konsistensi suatu alat ukur dalam menghasilkan data. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha dengan bantuan aplikasi SPSS.

Adapun kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Pengambilan Keputusan

Nilai Cronbach's Alpha	Tingkat Reliabilitas	Keterangan
$\geq 0,90$	Sangat tinggi	Sangat reliabel
0,70 – 0,89	Tinggi	Reliabel
0,50 – 0,69	Cukup	Dapat diterima
$< 0,50$ Rendah	Rendah	Tidak reliabel

Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$, yang berarti setiap item pertanyaan dalam kuesioner memiliki konsistensi internal yang baik dan layak digunakan sebagai alat pengumpul data. Dengan demikian, uji reliabilitas memberikan keyakinan bahwa instrumen penelitian akan menghasilkan data yang stabil, konsisten, dan dapat dipercaya.

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Apabila penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, maka diperlukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi

memenuhi kriteria statistik yang baik. Uji asumsi klasik meliputi:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan menggunakan metode Kolmogorov–Smirnov atau P-P Plot.

Kriteria:

- a. Jika nilai significance (Sig) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b. Jika nilai Sig $\leq 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance.

Kriteria:

- a. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai Tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah varians residual antar pengamatan bersifat konstan. Pengujian dapat dilakukan dengan metode Glejser Test.

Kriteria:

1. Jika nilai Sig $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika nilai Sig $\leq 0,05$ maka terdapat heteroskedastisitas

Hasil dari ketiga uji asumsi klasik tersebut menentukan apakah data yang digunakan memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi lebih lanjut. Jika semua asumsi terpenuhi, maka hasil pengujian hipotesis akan lebih valid dan dapat dipercaya.

3.6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk mengolah data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi yang bermakna sehingga dapat menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian.

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilakukan secara sistematis menggunakan alat bantu statistik untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian. Penelitian ini menggunakan dua bentuk analisis data, yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial (statistik).

3.6.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta menjelaskan distribusi data dari masing-masing variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2013), analisis deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian berdasarkan hasil perhitungan statistik sederhana seperti frekuensi, persentase, rata-rata (mean), dan standar deviasi.

Langkah-langkah dalam analisis deskriptif meliputi:

1. Mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan data demografis seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan frekuensi penggunaan media sosial.
2. Menghitung skor rata-rata dari setiap indikator pada variabel informasi melalui media sosial pemerintah daerah (X) dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan (Y).
3. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel dan diagram untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persepsi responden terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner.

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang kecenderungan data serta menjadi dasar bagi analisis inferensial selanjutnya.

3.6.2. Analisis Inferensial (Statistik)

Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini, analisis inferensial dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana atau berganda (tergantung jumlah variabel independen yang digunakan) dengan bantuan program SPSS (Statistical

Package for the Social Sciences) versi terbaru.

Tahapan analisis inferensial meliputi:

1. Uji Korelasi (r)

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel bebas (informasi media sosial) dan variabel terikat (partisipasi masyarakat).

Nilai korelasi berkisar antara -1 hingga +1:

- 1) Nilai positif menunjukkan hubungan searah (semakin tinggi X, semakin tinggi Y).
- 2) Nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah.
- 3) Nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak signifikan.

Interpretasi kekuatan hubungan berdasarkan Sugiyono (2019):

Tabel 3.4. Interpretasi kekuatan hubungan

Rentang Nilai r	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,00	Sangat Kuat

2. Uji Regresi Linear Sederhana/Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y.

Persamaan umum regresi linear sederhana adalah:

$$Y=a+bX+e$$

Keterangan:

1. Y = variabel terikat (partisipasi masyarakat)
2. a = konstanta (nilai Y jika X = 0)
3. b = koefisien regresi (menunjukkan besarnya

pengaruh X terhadap Y)

4. X = variabel bebas (informasi media sosial pemerintah daerah)
5. e = error (faktor kesalahan)

Jika terdapat lebih dari satu variabel bebas, maka digunakan regresi linear berganda dengan persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Hasil dari uji regresi akan menunjukkan apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika nilai Sig (p-value) < 0,05 → pengaruh signifikan.
2. Jika nilai Sig ≥ 0,05 → pengaruh tidak signifikan.

4. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika nilai Sig (p-value) < 0,05 → terdapat pengaruh signifikan secara simultan.
- b. Jika nilai Sig ≥ 0,05 → tidak terdapat pengaruh secara simultan.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar persentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Misalnya, jika $R^2 = 0,65$, maka dapat diartikan bahwa 65% variasi perubahan partisipasi masyarakat dijelaskan oleh informasi media sosial, sedangkan

sisanya 35% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dengan demikian, metode analisis data dalam penelitian ini terdiri atas dua tahap utama:

1. Analisis deskriptif, untuk memberikan gambaran umum terhadap data responden dan variabel penelitian.
2. Analisis inferensial (regresi), untuk menguji hipotesis dan mengetahui arah serta besarnya pengaruh antarvariabel.

Melalui kedua analisis tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat, objektif, serta memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan administrasi publik, khususnya dalam bidang komunikasi pemerintahan berbasis media sosial.

3.7.Keterbatasan Penelitian

Setiap penelitian memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak dapat dihindari, baik dari segi waktu, metode, maupun kondisi lapangan. Keterbatasan ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi nilai ilmiah penelitian, tetapi justru untuk menunjukkan sikap objektif dan realistis peneliti terhadap hasil yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner daring (online) melalui platform seperti Google Form. Metode ini dipilih karena efisien dari segi waktu dan biaya, namun memiliki kelemahan yaitu keterbatasan jangkauan responden yang tidak aktif menggunakan internet atau media sosial. Akibatnya, sebagian kelompok masyarakat yang kurang terhubung dengan teknologi digital mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam hasil penelitian ini.

2. Keterbatasan pada Persepsi Responden

Data yang diperoleh sepenuhnya didasarkan pada persepsi subjektif responden terhadap informasi yang disampaikan melalui media sosial pemerintah daerah. Faktor subjektivitas ini dapat memengaruhi keakuratan jawaban, karena responden mungkin memberikan tanggapan yang bersifat sosial-desirabel (ingin terlihat positif) atau kurang memahami makna pertanyaan secara mendalam.

3. Keterbatasan dalam Variabel Penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada satu variabel bebas, yaitu informasi melalui media sosial pemerintah daerah, dan satu variabel terikat, yaitu partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Padahal, dalam realitas sosial, partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi pula oleh berbagai faktor lain seperti tingkat pendidikan, kepercayaan publik terhadap pemerintah, atau kondisi sosial ekonomi yang tidak dijadikan variabel penelitian.

4. Keterbatasan Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu yang relatif singkat dan hanya mencakup wilayah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan sepenuhnya ke daerah lain dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda.

5. Keterbatasan dalam Analisis Statistik

Analisis yang digunakan masih terbatas pada analisis regresi linear sederhana/berganda untuk menguji hubungan antarvariabel. Penelitian lanjutan dengan metode statistik yang lebih kompleks seperti Structural Equation Modeling (SEM) atau Path Analysis dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antarindikator.

Meskipun terdapat keterbatasan tersebut, penelitian ini tetap memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pemahaman mengenai peran media sosial pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa dengan cakupan yang lebih luas dan pendekatan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, K., Ismail, A. M. I., Suarlin, Haruna, M., Ariyadi, A., Syukur, A. T., Mappasere, F. A., Guntur, M., Safaruddin, Fattah, S., Taliang, A., Rosdiana, Anas, A., Ahsan, S. C., & Asriani. (2024). Administrasi pembangunan. CV. Media Sains Indonesia.
- Anggiawan, F. V. (2023). ANALISIS PENGARUH MEDIA SOSIAL PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKOHARJO. [Skripsi]. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024, 7 Februari). APJII: Jumlah pengguna internet Indonesia tembus 221 juta orang. Diakses pada (23 sep), dari https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang?utm_source
- Fajrilla, C. (2025). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui sosialisasi media sosial. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*,5(1),30–38.<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Julpahmi. (2023). PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK GENERASI MILENIAL HIMPUNAN MAHASISWA ACEH SELATAN (HAMAS) PADA PEMILU PRESIDEN 2019 [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
- Katharina, R. (Ed.). (2020). Pelayanan publik dan pemerintahan digital Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mannayong, J., Rizal, M., Herling, & Faisal, M. (2024). Transformasi digital dan partisipasi masyarakat: Mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif. *Jurnal Administrasi Publik*,20(1),51-72.
<https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.260>
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif, edisi revisi. PT Remaja Rosdakarya.

- Nasution, Z. (2002). *Komunikasi pembangunan: Pengenalan teori dan penerapannya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmanto, A. N. (2022). Media Sosial dan Persepsi Publik tentang Good Governance pada Pemerintah Daerah di Solo Raya. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 20(1), 88–100. <https://doi.org/10.31315/jik.v20i1.6433>
- Riyanto, A. D. (2024, 21 Februari). Hootsuite (We are Social): Data Digital Indonesia 2024. Diakses pada [tanggal Anda mengakses], dari <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-data-digital-indonesia-2024/>
- Sitorus, Y. L. M., Usman, S., & Yanthy, N. O. (2023). *Perencanaan pembangunan partisipatif pada penduduk asli*. CV Mega Press Nusantara.
- Sudirman, S. (t.t.). *Paradigma pembangunan berkelanjutan*. MAGNUM
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Metodologi penelitian bisnis & ekonomi: Pendekatan kuantitatif*. Pustaka Baru Press
- Umayasari, U., & Amantha, G. K. (2025). Partisipasi warga melalui media digital dan implikasinya terhadap akuntabilitas serta perumusan kebijakan pemerintah daerah di Lampung. *Journal of Administration, Governance, and Political Issues*, 2(1), 109–124. <https://journal.pubmedia.id/index.php/jagpi/index>
- Yuana, I., Sabilalo, M. A., Fauzih, & Halim, A. I. M. (2025). Leadership, governance, and organizational environment as determinants